

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian manajemen pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”¹. Istilah dari bahasa Inggris tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin.¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.¹

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin

¹ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), hal. 129

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 114

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 441

bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.¹ 6

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹ 7

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

¹ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta⁶: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 54

¹ *Ibid.*, hal. 15-17

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan.
- c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

Fungsi pengelolaan

Banyak sekali fungsi pengelolaan atau manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

- b) Pengorganisasian (*Organizing*)

pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu

c) pengarahan (*Actuating*)

pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d) pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.¹

Untuk pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakatdesa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.¹

2. Potensi desa

Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.² Jadi potensi desa ialah daya kekuatan kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah desa dengan kemungkinan bisa di kembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

¹ Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 282

¹ Rosi Yuliawati, "Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)" dalam <https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses 6 Juni 2021

² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 4

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Desa menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.²

1

Secara umum potensi desa dapat dibedakan menjadi dua:

Pertama: ialah potensi fisik yaitu tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan SDM.

Kedua: ialah potensi non-fisik yaitu masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Potensi fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan SDA yang ada dalam sebuah desa yakni berupa:

1) Lahan

Lahan bukan hanya mencakup tempat tumbuhnya tanaman. Akan tetapi bisa sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu.

² Eko Putro Sandjojo, Buku Panduan pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hal. 71

2) Tanah

Di dalam tanah mencangkup berbagai kandungan kekayaan.

Contoh tanah yang subur, tambang, dan mineral

3) Air

Pada pedesaan potensi air yang bersih sangatlah melimpah.

Dari dalam tanah, air didapatkan melalui pemompaan, mata air, atau penimbaan yang mana fungsinya sebagai faktor pendukung dalam kehidupan manusia.

4) Iklim

Iklim selalu berkaitan dengan curah hujan dan temperatur yang sangat berpengaruh terhadap setiap daerah. Sebuah desa bisa maju karena faktor kecocokan iklim bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Misalnya tempat rekreasi, perkebunan buah, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat desa.

5) Lingkungan geografis

seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa

6) Ternak

Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

7) Manusia

Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

b) Potensi Non-fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparaturnya, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
- 2) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :
 - a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK,

Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain

- b) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain
- c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
- d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), BadanUsaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

3) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lainlain.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

- a) wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis
- b) wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis

- c) wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

3. Badan Usaha Milik Desa

Definisi dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah suatu lembaga/badan ekonomi didirikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suatu desa, yang mana semua atau sebagian besar dari modal adalah milik pemerintah desa melalui penyertaan secara langsung yang diperoleh dari hasil kekayaan yang dipisahkan. Dan tujuan didirikannya BUMDes yaitu untuk mengelola aset desa, memberikan layanan kepada masyarakat desa, dan memberdayakan penduduk desa. Dalam sebuah desa memiliki beberapa lembaga/badan perekonomian salah satunya yaitu BUMDes. Namun diantara lembaga/badan perekonomian tersebut memiliki sebuah perbedaan yang membedakan antara lembaga satu dan yang lainnya. Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi yang lain dengan tujuan agar berdirinya BUMDes memiliki kinerja dalam memberikan peran untuk memajukan perekonomian penduduk desa.²

Letak perbedaan BUMDes dan lembaga ekonomi yang lain yaitu:

- a) Dalam hak milik dan pengelolaannya BUMDes merupakan lembaga milik desa dan pengelolaannya secara gotong royong
- b) Menjalankan Badan usaha didasarkan dengan potensi desa dan hasil informasi dari pasar

² Jusuf Suit, Almasdi, dan Yudefri Yusuf, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan dalam Pembangunan Nasioal*, (Bogor: IPB Press, 2012), hal. 27

- c) Pemilihan Laba atau hasil yang didapatkan dalam mensejahterakan anggota (penyerta modal) serta penduduk desa ditentukan oleh kebijakan desa
- d) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemdes, BPD dan Anggota)

Tujuan didirikannya BUMDes dalam suatu desa adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan peningkatan dalam perekonomian desa
- b) Memperkuat PADes dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya
- c) Mengembangkan pengelolaan potensi yang ada pada desa sesuai dengan yang dibutuhkan penduduk desa.
- d) Menjadi penanggung jawab pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Indikator peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu:

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten NO. 3 tahun 2015 pasal 10, prinsip pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang terdiri 3 unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi.

Unit yang berbeda di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam
- 2) Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertanian, fotocopy, sablon, pertanian, peternakan, dan perikanan.

a) Pembentukan BUMDes

Prinsip umum dalam pembentukan BUMDes

1. Pendirian BUMDes harus berdasarkan kebutuhan desa
2. BUMDes dibentuk dengan ketetapan Peraturan Desa yang berpedoman pada PERPUU
3. Pembentukan BUMDes dengan didasari oleh prakarsa pemerintah desa, BPD atau masyarakat setempat dengan proses musyawarah desa.

Yang menjadi pertimbangan:

- a. Potensi desa yang mendukung BUMDes
- b. Keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif
- c. Kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa
- d. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

b) Prinsip pembentukan dan pengelolaan BUMDes

1. Pemberdayaan

Dengan harapan ada peningkatan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

2. Keberagaman

Dengan prinsip ini diharapkan BUMDes yang dibentuk harus memperhatikan keberagaman usaha yang ada di masyarakat dengan maksud usaha yang beragam menjadi bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaannya.

3. Partisipasi

Peran aktif masyarakat diperlukan dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes dan mendukung keberlangsungan BUMDes.

4. Demokrasi

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes didasarkan dengan memperhatikan keutuhan masyarakat

c) Bentuk badan usaha dan bidang usaha

Bentuk badan hukum BUMDes

- 1) BUMDes harus berbaan hukum
- 2) BUMDes wajib memiliki AD ART
- 3) Badan hukum yang dibentuk bisa berupa PT, CV, Firma atau bentuk badan hukum lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

d) Bidang usaha BUMDes

1. Bidang usaha yang dikelola BUMDes dapat bergerak pada satu bidang usaha atau gabungan dari berbagai usaha.
2. Bidang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes
 - a. Jasa keuangan, simpan pinjam

- b. Jasa lain; listrik desa, telekomunikasi desa, transportasi, pengelolaan sampah, penggilingan padi, air bersih dan jasa lainnya.
 - c. Perdagangan; pengelolaan pasar desa, penyediaan dana penyaluran sembilan bahan pokok, penyaluran dan penyediaan sarana produksi pertanian, perdagangan hasil pertanian.
 - d. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya
- e) Kepengurusan BUMDes, terdiri dari dewan pengawas dan direksi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala desa
- 1. Dewan pengurus
 - a. Dewan pengawas BUMDes terdiri dari 3 orang yaitu seorang ketua dan 2 orang anggota :
 - b. Ketua Dewan pengawas diambilkan dari unsur perangkat desa
 - c. Anggota dewan pengawas dari tokoh masyarakat
 - d. Pengangkatan ketua dan anggota Dewan pengawas dilakukan melalui musyawarah desa
 - 2. Direksi dan kepala Unit usaha
 - a. BUMDes dipimpin oleh seorang direksi yang dipilih dari unsur masyarakat
 - b. Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Kepala Unit Usaha dan staf

- c. Direksi dan kepala unit usaha BUMDes sebagai pelaksana operasional BUMDes diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa melalui musyawarah desa
3. Penghasilan pengurus
 - a. Besarnya gaji/honorium dewan pengawas setinggi-tingginya adalah 40% gaji / honorium direksi
 - b. Besarnya gaji Direksi , kepala unit usaha, dan staf ditetapkan berdasarkan kemampuan keungan BUMDes (sesuai pembagian hasil usaha) dengan persetujuan kepala Desa melalui pengawas desa

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan secara singkat maka peran dari sebuah BUMDes adalah sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonmi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa tersebut. Pada skripsi ini yang menjadi objek penulis ialah peran dari BUMDes Sentul Adventure serta kendala-kendala yang dihadapi oleh BUMDes Sentul Adventure. Peneliti ingin mengetahui apakah BUMDes yang didirikan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan sudah sejauh mana peran BUMDes terhadap PADes dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 71 ayat (1) keunagan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 72 ayat (1) disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran dan belanja negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pendapatan Asli Desa merupakan sebuah pendapatan yang dipakai oleh pemerintah desa dalam memperkuat bidang keuangan dalam melaksanakan proses pembangunan dan proses pemerintahan. Oleh sebab itu sangat penting bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan PADes. Jika dalam sebuah desa bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desanya, maka mudah bagi desa tersebut melakukan proses pembangunan dalam segala sektor dan juga mudah mewujudkan menjadikan desa yang mandiri.

Dan dengan didirikannya sebuah BUMDes maka seharusnya menghasilkan sebuah peningkatan terhadap PADes yang bersumber dari pendapatan BUMDes jika peran BUMDes itu berjalan dengan baik dan

sesuai peraturan pemerintah tentang pendirian dan peran dari BUMDes itu sendiri.

5. Perekonomian masyarakat

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.²

3

Sedangkan, pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar. Perekonomian rakyat juga harus diimbangi dengan adanya perubahan struktural masyarakat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu:

pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari perilaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil.

Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partipatif (*participatory development*). Ekonomi rakyat yang dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan.

² Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, diakses dari <https://www.bappenas.go.id>

Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan (A. Simarmata, 1998: 117).

Sedangkan menurut Mubyarto dalam Indra Ismawan (2001: 97), upaya mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Asumsinya, setiap manusia dan kelompok manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

Kedua, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, pencerahan, peningkatan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Ketiga, melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Perekonomian rakyat, tidak hanya dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan modal sebagai stimulan. Tetapi, harus menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah atau yang belum berkembang.

Adapun indikator perekonomian rakyat dapat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang atau akses yang lebih besar pada aset produksi atau modal.
2. Memperkuat kemitraan usaha ekonomi
3. Penguatan industri kecil
4. Mendorong munculnya wirausaha baru, dan
5. Adanya pemerataan.

Disamping itu, adapun aspek-aspek dalam perekonomian rakyat, yaitu:

- a) Aspek pembinaan Merupakan pembinaan baik Sumber Daya Manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi.
- b) Aspek pembiayaan Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk *Community Development* (CD) sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM.
- c) Aspek Kemitraan Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerja sama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan.
- d) Aspek Yuridis Formal Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah (Zulkarnain, 2003: 9-10).

Tidak kalah pentingnya adalah perekonomian industri kreatif. Perekonomian industri kreatif juga mendorong perkembangan

perekonomian rakyat. Ekonomi industri kreatif merupakan wujud dari upaya pembangunan berkelanjutan melalui kreatifitas. Dimana, pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki sumber daya terbarukan (Gunaryo, dkk, 2008: 1). Dengan kata lain, ekonomi industri kreatif adalah manifestasi dari semangat bertahan hidup masyarakat dan tawaran peluang sumber daya. Industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang dibangun oleh para pekerja kreatif dan pekerja di sektor budaya.

Menurut Towse, industri kreatif secara akademis dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: a) Aspek budaya Industri kreatif ditinjau dari aspek budaya, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan hiburan. b) Aspek hak cipta Industri kreatif dilihat sebagai industri yang mengandung berbagai aktivitas yang dapat dilindungi oleh hak cipta, dan juga aktivitas distribusi dan penjualan eceran. c) Aspek kreativitas Dalam industri kreatif memiliki unsur kekreatifan dalam mengembangkan aspek industri, tentu menjadi faktor utama yang harus dimiliki sumber daya manusia (Basuki, 2008: 4).

Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007, adapun industri kreatif memiliki karakter sebagai berikut:

- a) Fluktuasi pertumbuhan nilai tambah terjadi diseluruh subsektor industri kreatif.
- b) Fluktuasi pertumbuhan nilai tambah diikuti oleh fluktuasi pertumbuhan jumlah industri dengan sensitivitas yang tinggi pula. Artinya pondasi

industri yang belum kokoh atau kuat akan berdampak pada kondisi entry and exit barrier cenderung kecil dan sebaliknya

- c) Fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi, namun tidak setinggi fluktuasi sumber daya alam.
- d) Memiliki level teknologi dan produktivitas yang relatif konstan (Basuki, 2008: 38).

Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mengembangkan industri kreatif, perlu dilakukan penguatan pondasi dan pilar-pilar industri kreatif terlebih dahulu, sehingga industri kreatif dapat bertumbuh kembang lebih tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti adalah pertama dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi kasus di Desa Sei Beras-Beras dan Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu)” oleh Umar Balaghuddin (skripsi tahun 2019). Hasil dari penelitiannya Peran BUMDes kurang maksimal. Adapun kendala dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya sosialisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan BUMDes, konsep pembangunan desa yang dipahami hanya sebatas pembangunan fisik, serta terdapat badan usaha lain sejenis BUMDes yang sudah terlebih dahulu berdiri². Persamanya dengan penelitian yang⁴ akan dilakukandengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannyadengan

² Umar Balaghuddin, Peran Badan Usaha Milik⁴Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dalam <http://repository.uin-suska.ac.id> dikases pada 19 Juli 2019

penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian mengenai analisis pengelolaan potensi desa melalui BUMDes guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam mengelola potensi desa. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu tidak hanya membahas pengelolaan potensi desa guna meningkatkan PADes saja akan tetapi juga pada perekonomian masyarakat Desa Sentul.

Kedua, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Blimbing kecamatan Boja Kabupaten Kendal) oleh Irkham Abdur Rochim tahun 2019. Hasil penelitian dilihat dari segi pelaksanaannya peran dari BUMDes Blimbing Makmur Jaya sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pengelolaannya belum bisa dikelola secara maksimal.² Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Letak perbedaannya yaitu mengenai analisis pengelolaan potensi desa melalui BUMDes guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat tidak ditinjau dari perspektif Islam. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu tidak hanya membahas pengelolaan potensi desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga pada Pendapatan Asli Desa.

Yang ketiga dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Perwitasari dalam upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” oleh Rismawati (skripsi tahun 2018), hasil dari penelitian menunjukkan adanya BUMDes dalam

² Irkham Abdur Rokhim, Peran Badan Usaha Mifik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo

memberikan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat bisa dikatakan baik dalam segi pelaksanaannya.² Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini menjelaskan hasil analisis pengelolaan potensi desa melalui BUMDes guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapi. Letak pembaruan skripsi ini tidak hanya fokus pada analisis pengelolaan potensi desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga pada Pendapatan Asli Desa tersebut.

Keempat, dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kabupaten Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)” oleh Hartini (Skripsi tahun 2019). Hasil dari penelitian ini dilihat dari kegiatan BUMDes sudah jelas dalam membantu masyarakat Batetangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.² Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yakni analisis pengelolaan potensi desa tidak dalam tinjauan ekonomi syariah. Letak kebaruan penelitian ini yaitu fokus pada pengelolaan potensi desa guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat.

Kelima dengan judul “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta” oleh Reza M. Zulkarnaen. Hasil penelitian keberadaan BUMDes untuk

² Rismawati, Peran Badan Usaha Milik Desa Perwitasari dalam upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 1 November 2018

² Hartini, Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kabupaten Polman (Tinjauan Ekonomi Islam dalam <http://repository.stainparepare.ac.id> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa parakan salam dan desa salam jaya segera membentuk pengelolaan bumdes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari bumdes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.² Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Letak Perbedaannya yaitumendeskripsikan hasil analisis pengelolaan potensi desa Guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu fokus menganalisis pengelolaan potensi desa.

Keenam, dengan judul “Pengelolaan Potensi Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sri Gading” oleh Edison Ledi Bullang (skripsi tahun 2017). Hasil penelitian ini potensi yang ada di Sri Gading adalah potensi pertanian, irigasi, budaya, kuliner dan wisata hasil dari penelitian ini pengelolaan potensi desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa.² Persamaannya menggunakan metode kualitatif. Letak perbedaannya pada fokus penelitian yaitu mendeskripsikan hasil analisis pengelolaan potensiGuna meningkatkan perekonomian masyarakat.Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu fokus pada analisis pengelolaan potensi desa melaluiBUMDes untuk meingkatkan perekonomian masyarakat.

Ketujuh, dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Desa” oleh Ahmad Soleh (jurnal tahun 2017). Hasil dari penelitian ini didasarkan pada

² Reza M zulkarnaen, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta dalam <http://jurnal.unpad.ac.id> di akses pada tahun 2016

² Edison Ledi Bullang, Pengelolaan Potensi Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sri Gading dalam <http://repo.apmd.ac.id> di akses pada tanggal 5 Maret 2018

berbagai permasalahan yang dihadapi pada masing-masing desa maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan desa harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa. Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkah, dasar, dan strategi kebijakan yang cerdas, dan dalam upaya pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

³ Persamaannya dengan penelitian saya⁰ menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis pengelolaan potensi desa Guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat. Novelty skripsi saya fokus pada analisis pengelolaan potensi desa serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola potensi desa

Kedelapan, dengan judul “Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur” oleh Hari Fitrianto (jurnal tahun 2016). Hasil dari penelitian ini Signifikasi BUMDes terhadap kelompok-kelompok Usaha Mikro yang telah tumbuh di Masyarakat sangat besar. Signifikansi BUMDes terhadap kemandirian Masyarakat Desa tampak pada; BUMDes menjadi lembaga yang secara aktual

³ Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa dalam <https://adoc.pub> di akses pada Februari 2017

dan potensial mampu mensejahterakan masyarakat, karena keberadaan BUMDes mampu menghindarkan masyarakat dari rentenir.³ Persamaan penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu menganalisis tentang pengelolaan potensi desa Guna meningkatkan PADes dan perekonomian masyarakat. Novelty dari penelitian saya pengelolaan potensi desa dalam upaya memberikan peningkatan pada PADes dan Perekonomian masyarakat sehingga terwujudnya sebuah desa yang mandiri

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

Berdasarkan skema kerangka konseptual yang tertera diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa, yang mana memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan perekonomian masyarakat.

³ Hari Fitrianto, Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur dalam <http://journal.unair.ac.id> diakses pada Desember 2016